

## **Peran Audit Eksternal Dalam Mencegah Fraud Laporan Keuangan di Pemerintahan**

Jovita Farren Tanesha<sup>1</sup>, Maizzaluna Aulia Putri Azizah<sup>2</sup>, Muhammad Hanif Firdaus<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Malang

\*jovita.farren.2304226@students.um.ac.id

### **Abstrak**

Audit eksternal, yang dilakukan oleh badan independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memainkan peran penting dalam mendeteksi dan mencegah kegiatan kecurangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan menilai kewajaran laporan keuangan dan mengevaluasi sistem pengendalian internal, auditor eksternal dapat mengidentifikasi potensi kecurangan dan memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk membahas lebih dalam tentang pentingnya peran auditor eksternal dalam mencegah fraud di dalam laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menekankan bahwa audit eksternal sangat penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam pelaporan keuangan pemerintah, sehingga dapat mencegah praktik-praktik kecurangan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

**Kata Kunci:** Auditor Eksternal, Fraud, Risiko Kecurangan, Laporan

### **Abstract**

*External audits, conducted by independent bodies such as the Supreme Audit Agency (BPK), play an important role in detecting and preventing fraudulent activities in government financial management. By assessing the fairness of financial statements and evaluating internal control systems, external auditors can identify potential fraud and ensure the accountability of the state's financial management. The research uses a qualitative method based on desk research which aims to discuss more deeply the importance of the role of external auditors in preventing fraud in government financial reports. This research emphasizes that external auditing is essential to ensure transparency, accountability, and compliance with regulations in government financial reporting, so as to prevent fraudulent practices and promote good governance.*

**Keywords:** *External Auditor, Fraud, Fraud Risk, Financial Statement*

## **PENDAHULUAN**

Landasan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara adalah pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Namun, tantangan terbesar dalam pengelolaan keuangan di sektor pemerintahan adalah risiko terjadinya fraud atau penyimpangan. Dalam konteks ini, kecurangan dapat berupa penyalahgunaan anggaran, manipulasi laporan keuangan, dan penyelewengan aset negara yang sering kali sulit dideteksi. Audit eksternal memainkan peran penting dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan tersebut.

Audit eksternal, yang dilaksanakan oleh auditor independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Indonesia, memiliki tujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah serta mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh instansi pemerintah. Dengan melaksanakan audit secara objektif dan terpisah

dari pengaruh internal, auditor eksternal mampu mengidentifikasi potensi kecurangan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan negara. Peran audit eksternal menjadi semakin krusial mengingat kompleksitas dan besarnya anggaran yang dikelola oleh pemerintah, yang memerlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Artikel ini akan mengkaji peranan krusial audit eksternal dalam pencegahan penipuan di sektor pemerintahan. Dengan melaksanakan audit yang sistematis dan sesuai dengan norma yang ditetapkan, audit eksternal berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, memperkuat pengendalian internal, serta memberikan saran perbaikan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan akuntabilitas dan terhindar dari praktik penipuan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Fraud**

*Fraud* (kecurangan) adalah tindakan penipuan yang dilakukan dengan sengaja, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang tidak menyadari perbuatan tersebut, sementara pelaku kecurangan memperoleh keuntungan. Kecurangan sering kali muncul akibat adanya tekanan untuk melakukan penyimpangan atau dorongan untuk memanfaatkan peluang yang tersedia, serta adanya pembenaran yang diterima secara luas terhadap tindakan tersebut.

Kecurangan, sering kali kita temui di dalam organisasi perusahaan maupun lembaga pemerintahan. Secara fundamental, kecurangan dalam konteks pemerintah adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan didasari oleh ketidakjujuran, yang dapat dilakukan oleh individu, baik itu karyawan maupun atasan. Tindakan ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pemerintahan, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Akibat dari kerugian yang ditimbulkan oleh kecurangan ini pada akhirnya dapat berujung pada kebangkrutan.

### **Audit Eksternal**

Audit eksternal merupakan suatu proses evaluasi keuangan atau operasional yang dilaksanakan oleh auditor independen yang tidak terikat dengan organisasi atau entitas yang sedang diaudit. Tujuan utama dari audit eksternal adalah untuk memberikan penilaian yang objektif mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, serta menilai kesesuaian laporan keuangan tersebut dengan standar akuntansi yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam konteks pemerintahan, audit eksternal dilakukan oleh lembaga yang bersifat independen dari entitas yang diaudit, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Indonesia. Fungsi utama audit eksternal dalam sektor pemerintahan adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik dilakukan secara efektif, sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, audit eksternal juga bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kesalahan, penyalahgunaan, atau tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara.

### **Peraturan Pemerintah Terkait Audit Eksternal di Pemerintahan**

Audit eksternal yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan Indonesia diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang yang bertujuan untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu peraturan utama adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang memberikan kewenangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

sebagai lembaga independen untuk melakukan audit eksternal terhadap pengelolaan keuangan negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam mengenai pencegahan fraud dalam laporan keuangan di pemerintahan.. Metode ini dipilih karena peneliti berupaya menggali fenomena sosial yang kompleks dan terkait dengan kecurangan laporan keuangan dalam konteks organisasi pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini berkonsentrasi pada pengumpulan dan analisis teori yang berkaitan dengan mencegah kecurangan laporan keuangan, khususnya di sektor pemerintahan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, e-book, laporan penelitian sebelumnya, peraturan pemerintah, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Penggunaan sumber data tersebut penting untuk memastikan bahwa penelitian didasarkan pada bukti yang kuat, relevan, dan dapat diandalkan. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif. Metode tersebut digunakan untuk mengidentifikasi konsep utama yang terkandung dalam data teks. Analisis isi menyederhanakan data yang kompleks dan menggali makna tersirat, sehingga memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana laporan keuangan pemerintah mencegah penipuan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Standar pengauditan terus berubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi, teknologi, dan praktik terbaik dalam dunia bisnis. Perubahan ini mencakup adopsi prinsip-prinsip baru yang mendukung efektivitas dan efisiensi audit untuk mengatur pendeteksian kecurangan, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. SAS No. 53 menetapkan bahwa auditor berperan untuk mendeteksi dan melaporkan adanya kesalahan (error) dan ketidakberesan (*irregularities*) di dalam Laporan Keuangan. Dalam standar ini, auditor perlu memastikan adanya keyakinan yang cukup dalam mendeteksi kesalahan dan kecurangan material dalam laporan keuangan.

Setelah berkembangnya zaman, kini SAS No. 53 telah diubah menjadi SS NO. 82 untuk memperjelas tanggung jawab auditor dalam pendeteksian kecurangan. Maka dari itu, didalam standar ini diciptakannya pemisah antara pendeteksian kesalahan salah saji yang bersifat sengaja maupun tidak sengaja. Auditor juga diminta untuk mengarsipkan bukti-bukti atas penilaian risiko kecurangan secara terpisah. Namun, menurut The Panel of Audit Effectiveness (PAE), SAS No. 53, dianggap kurang efektif bagi auditor karena tidak ada prosedur audit yang spesifik tentang pendeteksian kecurangan. Sehingga, auditor tidak dapat mengimplementasikan standar ini dengan baik.

Alhasil berkat rekomendasi yang diberikan oleh PAE, SAS No. 82 kemudian diperbarui kembali menjadi SAS No. 99. Di Dalam SAS No. 99, peran auditor untuk mendeteksi kecurangan diperluas lebih dalam. Auditor bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko kecurangan yang terdapat didalam laporan keuangan. Auditor harus memiliki kemampuan dalam menaksir dan mendeteksi kecurangan yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan melalui pemahaman atas Entitas yang dapat dilakukan dengan cara brainstorming dengan pihak auditee, hal ini sesuai dengan SA Seksi 312 (IAPI, 2011). Auditor juga diminta untuk melakukan penilaian atas keefektifan program dan kontrol

perusahaan dalam mengurangi risiko kecurangan dalam laporan keuangan. Setelah itu, auditor perlu melakukan evaluasi kembali risiko kecurangan dalam laporan keuangan pada keseluruhan proses audit yang telah dilakukan. Tahap terakhir yang dapat dilakukan oleh auditor eksternal adalah mengkomunikasikan temuan fraud pada manajemen, komite audit, dan pihak-pihak lain. Dalam hal ini, manajemen perusahaan sangat memerlukan peran auditor eksternal agar laporan keuangan bersifat wajar, terhindar dari risiko kecurangan, dan dapat dipercaya oleh pihak luar.

Salah satu temuan dari audit eksternal yang seringkali terabaikan adalah signifikansi peran pengendalian internal dalam mencegah terjadinya fraud. Berdasarkan hasil audit eksternal, auditor umumnya memberikan saran mengenai perbaikan sistem pengendalian internal yang kurang efektif. Saran ini meliputi peningkatan pemisahan tugas dalam pengelolaan anggaran, pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana publik, serta pemantauan yang berkelanjutan terhadap pencatatan aset. Dengan memperkuat pengendalian internal, kemungkinan terjadinya fraud di sektor pemerintahan dapat diminimalkan.

Di samping itu, audit eksternal juga menilai kepatuhan pemerintah terhadap peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hasil audit menunjukkan bahwa instansi pemerintah yang memiliki pengendalian internal yang baik lebih efektif dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan lebih awal dibandingkan dengan instansi yang tidak memiliki pengendalian internal yang memadai.

Transparansi dan akuntabilitas yang rendah dalam laporan keuangan dapat meningkatkan risiko terjadinya tindakan penipuan. Untuk meminimalkan risiko tersebut, beberapa faktor penting perlu diperhatikan. Pertama, tekanan yang dialami individu dalam organisasi, baik berupa tekanan ekonomi, emosional, maupun profesional, sering kali menjadi pemicu utama terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan atau instansi pemerintah untuk mendukung kesejahteraan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta memberikan insentif yang sesuai agar tekanan ini tidak mendorong mereka untuk melakukan tindakan curang.

Kedua, peluang untuk melakukan kecurangan dapat muncul akibat adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal. Pengawasan dan kontrol yang lemah memberikan kesempatan bagi individu untuk menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki. Untuk mengatasi masalah ini, organisasi perlu memperkuat sistem pengendalian internal, memastikan adanya pemisahan tugas yang jelas, serta meningkatkan pengawasan secara berkala oleh pihak internal dan eksternal.

Ketiga, rasionalisasi yang dilakukan oleh pelaku kecurangan, di mana mereka mencoba membenarkan tindakan penipuan dengan berbagai alasan, seperti mempertahankan posisi, kekuasaan, atau reputasi. Untuk mengurangi risiko ini, organisasi harus membangun budaya kerja yang menekankan nilai-nilai etika dan integritas, serta memberikan pelatihan mengenai konsekuensi moral dan hukum dari tindakan penipuan.

Selanjutnya, laporan keuangan yang transparan sangat penting untuk mengurangi risiko penipuan. Dengan adanya transparansi, para pemangku kepentingan dapat memantau pengelolaan dana dengan lebih jelas, mengidentifikasi potensi risiko atau ketidakberesan dalam laporan, serta membuat keputusan yang lebih tepat. Laporan keuangan yang dapat dipercaya (akuntabel) juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pemerintah. Selain itu, pengawasan yang ketat dari pihak internal maupun eksternal akan lebih efektif jika laporan keuangan disajikan dengan transparan dan akurat, sehingga dapat mendeteksi potensi penipuan..

Meskipun audit eksternal memainkan peran krusial dalam identifikasi dan pencegahan kecurangan, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, audit eksternal dilakukan dengan pendekatan sampling, yang berarti tidak semua transaksi keuangan dapat dianalisis secara menyeluruh. Hal ini memberikan kesempatan bagi individu yang melakukan kecurangan yang terorganisir untuk menghindari deteksi. Kedua, auditor sangat bergantung pada data dan dokumen yang disediakan oleh entitas yang diaudit. Apabila manajemen dengan sengaja menyembunyikan informasi atau memalsukan dokumen, auditor eksternal mungkin akan kesulitan dalam mengidentifikasi kecurangan tersebut.

Batasan lainnya adalah bahwa audit eksternal umumnya dilaksanakan secara periodik, sehingga kecurangan yang terjadi di antara periode audit mungkin tidak terdeteksi dengan segera. Selain itu, auditor tidak memiliki wewenang untuk menegakkan hukum, sehingga tindakan lebih lanjut terhadap pelaku kecurangan memerlukan keterlibatan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau lembaga penegak hukum lainnya.

Berdasarkan hasil audit eksternal, sejumlah rekomendasi penting telah disampaikan untuk mencegah terjadinya penipuan di masa yang akan datang. Salah satu rekomendasi utama adalah peningkatan kapasitas pengawasan internal di setiap lembaga pemerintahan, sehingga audit eksternal dapat berfungsi secara lebih efektif sebagai mekanisme kontrol kedua. Selain itu, diperlukan kebijakan yang dapat memperkuat integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk penerapan sanksi yang tegas bagi pejabat yang terbukti terlibat dalam tindakan penipuan.

Audit eksternal memiliki peranan yang sangat penting dalam mengidentifikasi, mencegah, dan memberikan saran mengenai penipuan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Meskipun terdapat beberapa batasan, audit eksternal telah terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat sistem pengendalian internal di sektor pemerintahan. Dengan adanya audit eksternal yang independen dan berkualitas, risiko penipuan dapat diminimalkan, sehingga pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan dengan lebih bertanggung jawab.

## **SIMPULAN**

Audit eksternal memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah penipuan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Meskipun terdapat beberapa batasan, audit eksternal telah terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat sistem pengendalian internal di sektor pemerintahan. Dengan adanya audit eksternal yang independen, risiko *fraud* dapat diminimalkan, sehingga pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan dengan lebih bertanggung jawab. Terdapat keterbatasan pada penelitian ini sehingga tidak dapat mencakup semua jenis *fraud* yang dapat terjadi di pemerintahan karena banyaknya jenis kecurangan dan terbatasnya data. Penelitian ini menekankan pada peran auditor eksternal tanpa mengeksplorasi pengaruh faktor lain, seperti teknologi atau kebijakan antikorupsi dalam pencegahan *fraud*.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi manajemen keuangan pemerintah dan praktik-praktik audit. Penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pengendalian internal di setiap institusi agar audit eksternal lebih efektif dalam mencegah kecurangan. Kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan independensi auditor, seperti pelatihan rutin dan teknologi audit yang canggih, juga diperlukan. Selain itu, frekuensi dan cakupan audit perlu ditingkatkan untuk mencegah kecurangan di antara periode audit. Terakhir, kolaborasi yang lebih erat antara auditor

eksternal dan lembaga penegak hukum sangat penting untuk menindaklanjuti temuan audit dan memperkuat pengawasan keuangan negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Acica, P. S., & Yolanda (2016). Analisis Pengaruh Penerapan Audit Internal dan Audit Eksternal Terhadap Kualitas Good Governance. *Jurnal Ekonomi*, 18(3), 1-21
- Arin, D. L., & Sukirno. (2019). Pengaruh Independensi, Akuntabilitas dan Objektivitas terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Nominal*, 8(1), 1-16
- Engko, C., Ahuluheluw, N., & Selong, R. R. (2021). Analisis Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud Dengan Menggunakan Fraud Diamond Model. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 2(2), 45-59.
- Kusuma, C. A., & Firmansyah, A. (2018). Manajemen laba, corporate governance, kualitas auditor eksternal dan agresivitas pajak. *Jurnal Tekun*, 8(1), 108-123.
- Manossoh, H. (2016). Faktor-faktor penyebab terjadinya fraud pada pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Nur, A., & Suhada, S. (2024). Peranan Audit Forensik Dalam Mencegah Kejahatan Keuangan Perbankan Dengan Menggunakan Teknologi Informatika. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 4(4), 689-707.
- Rinjani, R. (2022). Peran Auditor Internal dan Auditor Eksternal Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(2), 1-16.
- Supriyadi, S. G., & Antoro, E. W. (2024). Penyebab Fraud Dalam Laporan Keuangan Merupakan Kesalahan Individu atau Budaya Organisasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 9(01), 49-62.
- Widianingsih, R., Maghfiroh, S., & Sunarmo, A. (2019). Pengaruh Teknologi Informasi dan Accounting Reporting terhadap Pencegahan Fraud. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 16(2).
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). *Pencegahan Fraud di Pemerintah Desa*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331-345.
- Novitasari, A. R., & Chariri, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Statement Fraud Dalam Perspektif Fraud Pentagon. *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4).
- Calsia, E. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Di Dinas Kesehatan Kota Pontianak Berdasarkan Teori Fraud Triangle. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuru Buana*, 5(2), 67-83.
- Natasia, B., Aprilia, D., Oktavianti, D., Setiawan, D., Fadila, F. N., & Meikhati, E. (2022, January). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Dalam Pelaporan Keuangan. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi* (Vol. 2, No. 1, pp. 74-74).